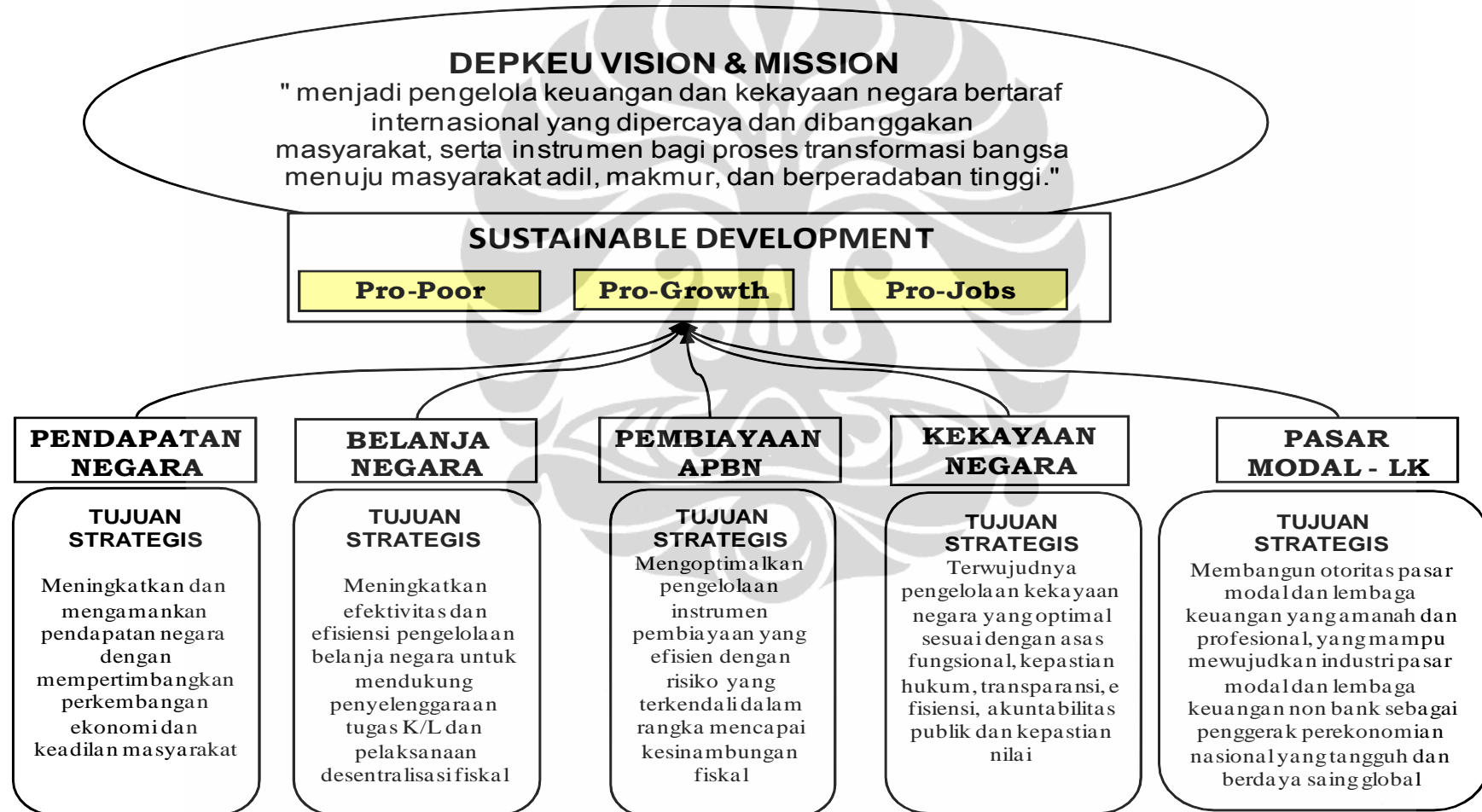
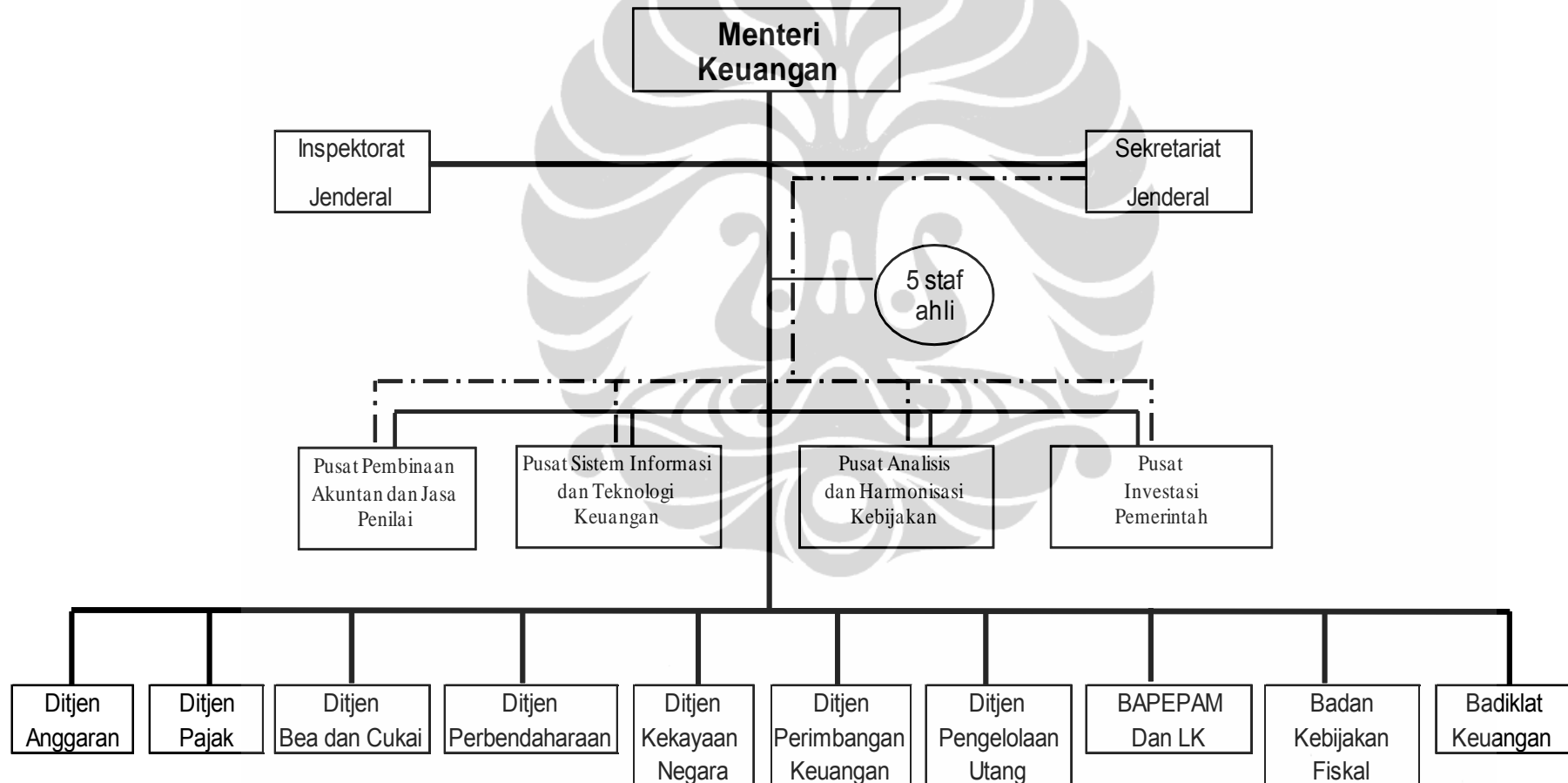


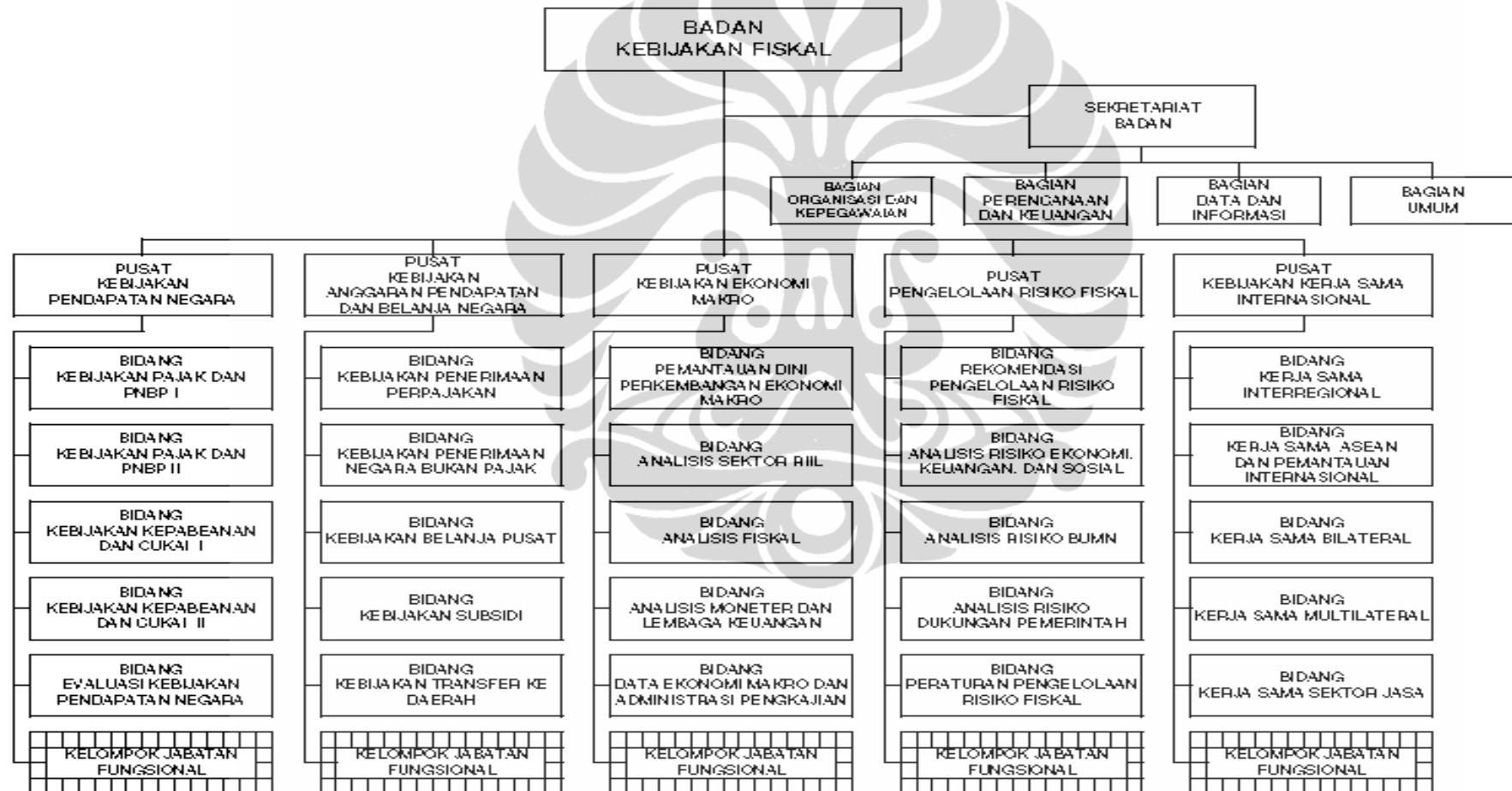
VISI, MISI, DAN LIMA TEMA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN



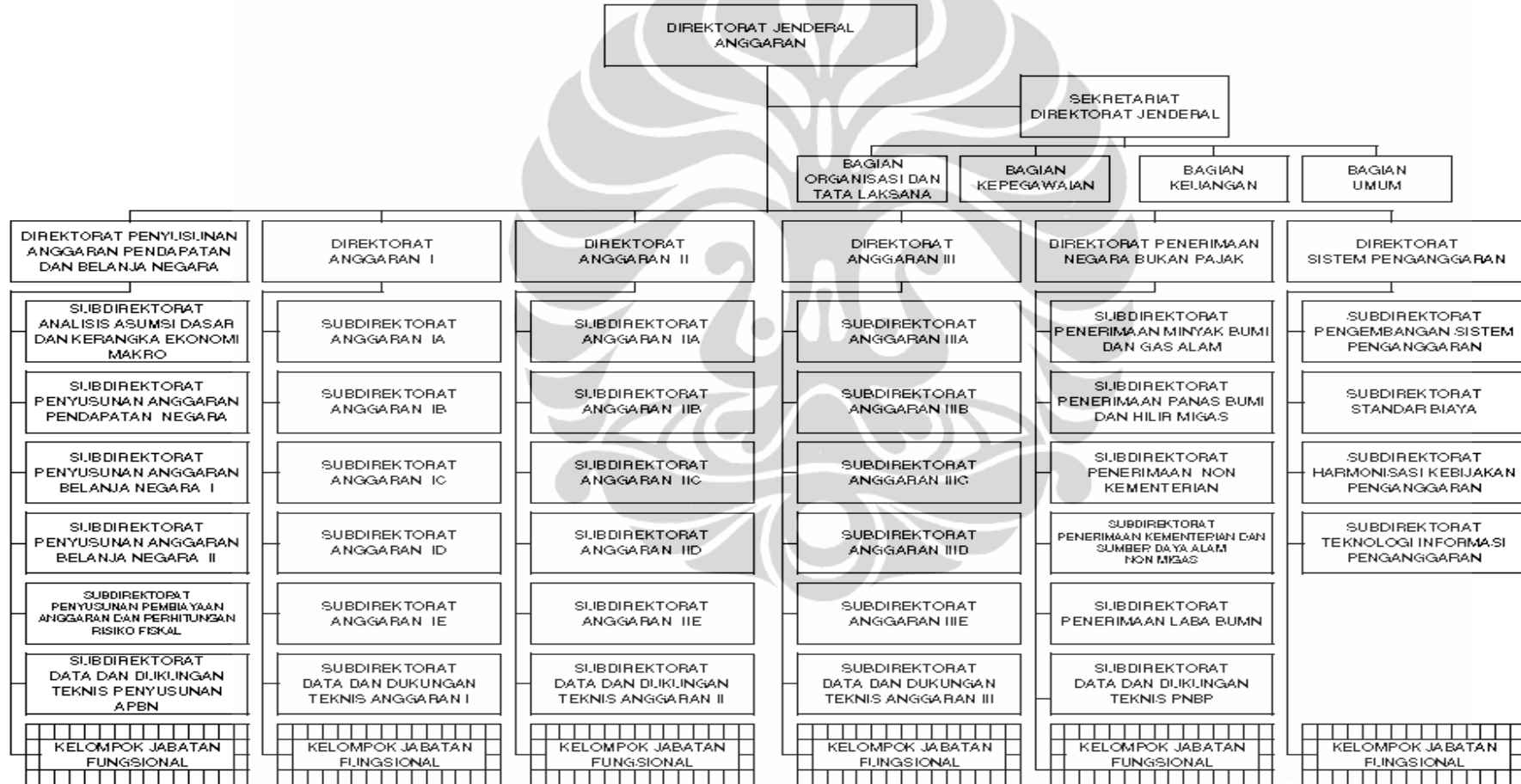
**STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN
(PMK No. 100 Tahun 2008)**



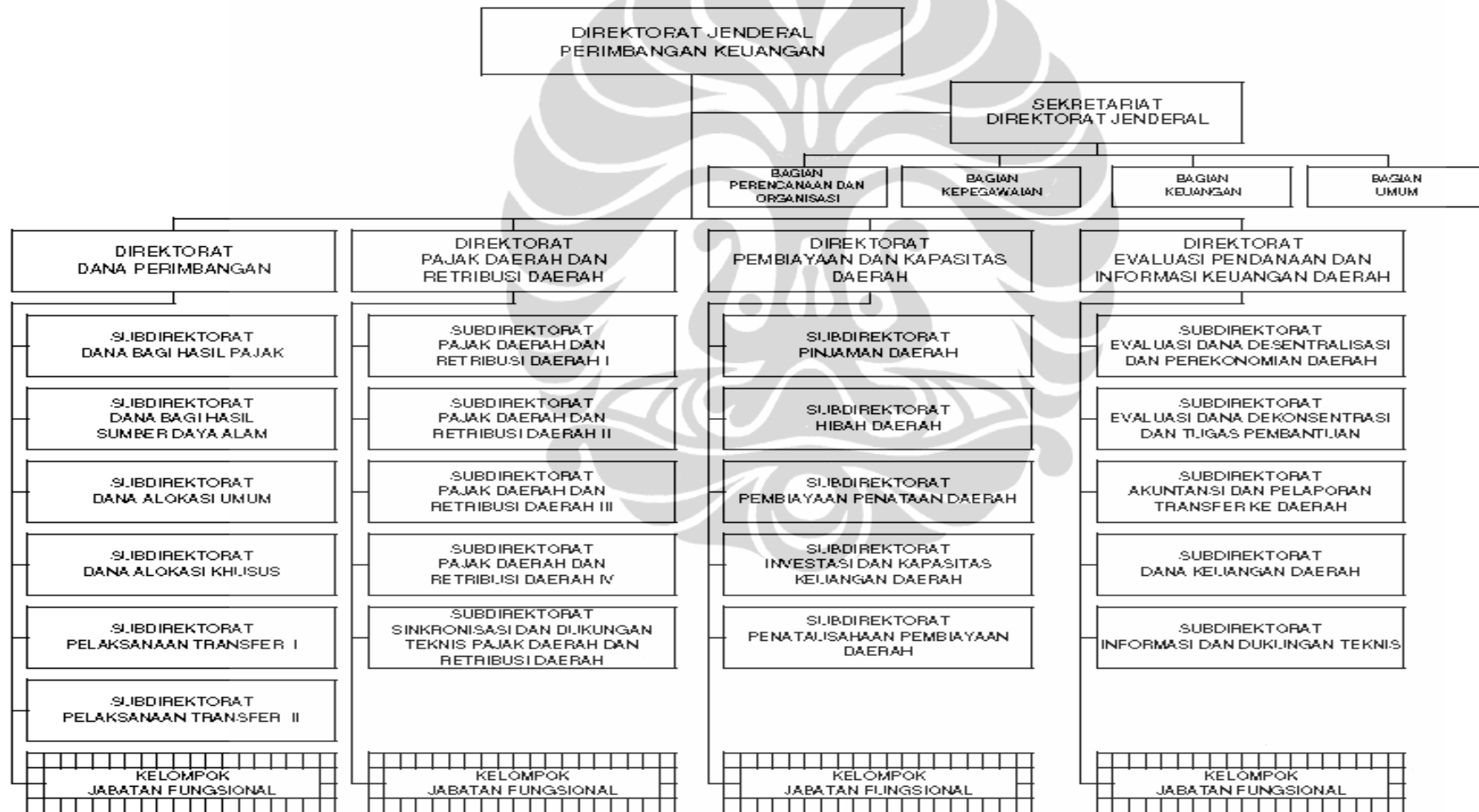
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL – DEPARTEMEN KEUANGAN
(PMK No. 100 Tahun 2008)**



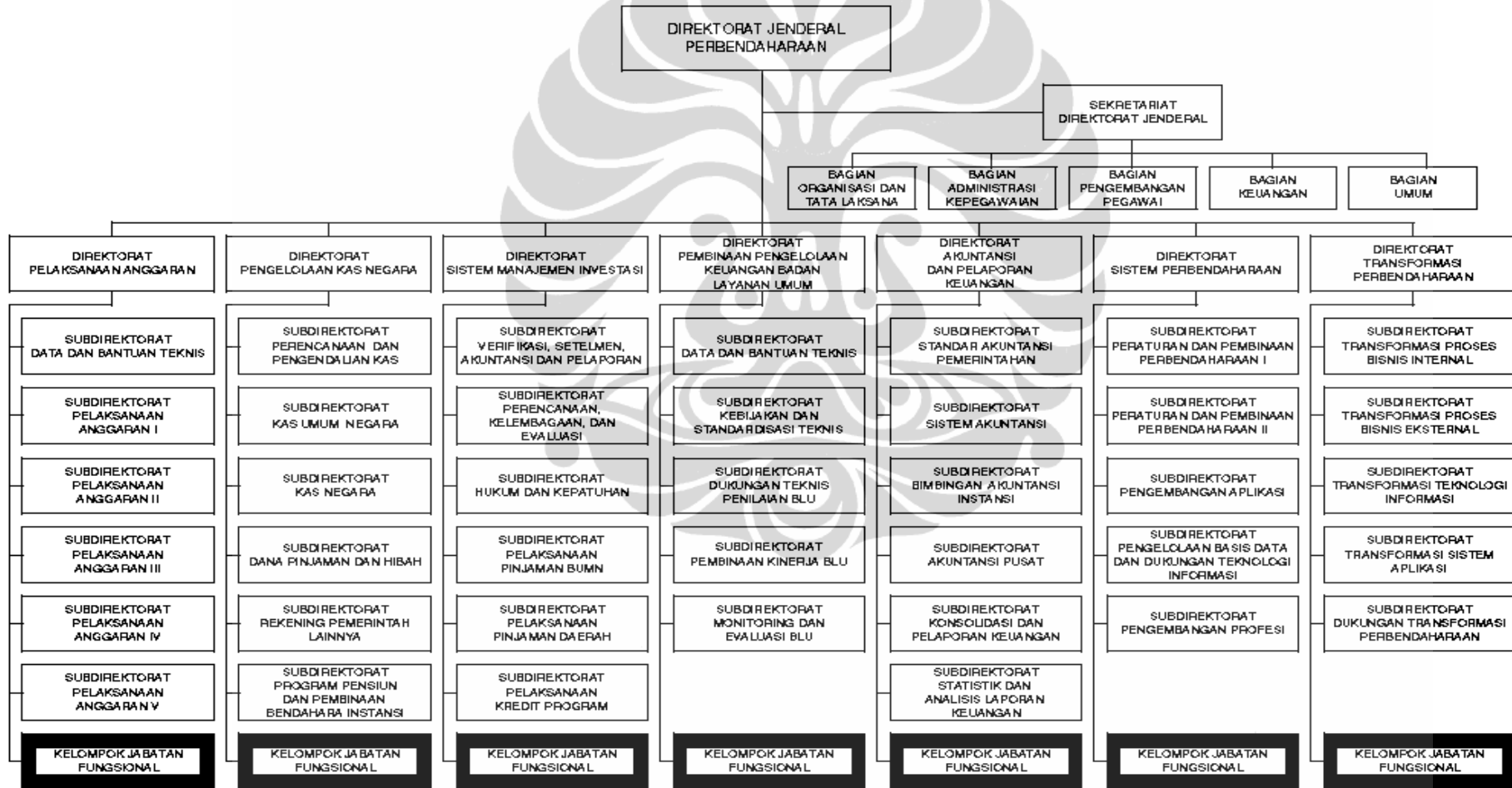
**STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN – DEPARTEMEN KEUANGAN
(PMK No. 100 Tahun 2008)**



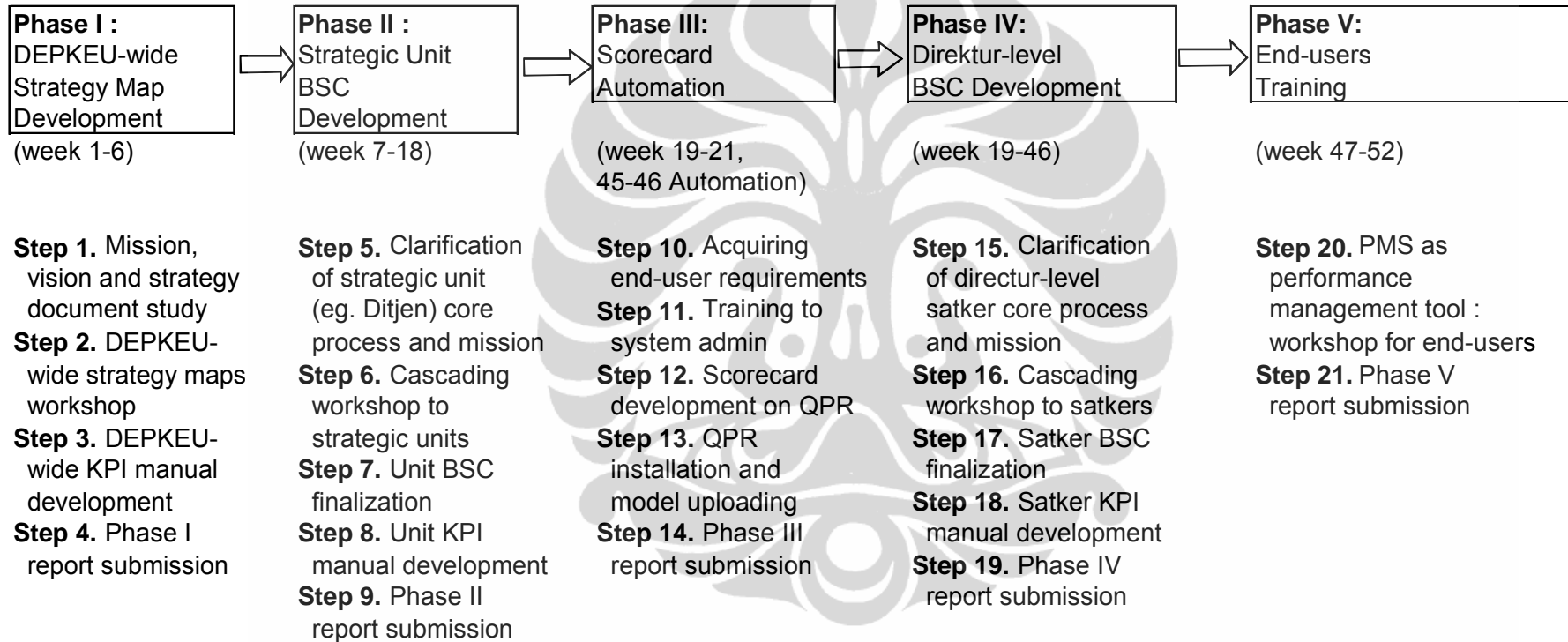
**STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – DEPARTEMEN KEUANGAN
(PMK No. 100 Tahun 2008)**



**STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – DEPARTEMEN KEUANGAN
(PMK No. 100 Tahun 2008)**



Timeline Pengembangan Balanced Scorecard



Sumber : Departemen Keuangan dan GML Performance, 2007

Lampiran 8

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS

Corporate Balanced Scorecard

Departemen Keuangan RI

(Belanja Negara - SS BEL 1.1)

Perspektif	MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER - STRATEGIC OUTCOME
Sasaran Strategis	Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil
Deskripsi Sasaran Strategis	1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN. 2. Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapa

Indikator Kinerja Utama 1.1 :	Jumlah dokumen alokasi belanja pusat dan dana transfer ke daerah tepat waktu (Sub KPI : DIPA K/L, SAPSK, dan dokumen alokasi belanja dana transfer ke daerah)
--------------------------------------	---

Deskripsi:	Definisi: 1. Dokumen alokasi belanja pusat adalah DIPA kementerian negara/lembaga yang telah disahkan berdasarkan hasil penelaahan antara Ditjen Perbendaharaan dengan kementerian negara/lembaga. 2. Dokumen Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK) yang ditetapkan be
------------	--

Formulasi

Jumlah DIPA seluruh K/L dan Pemda - Jumlah DIPA yang disahkan pada 31 Desember

$$\% \text{ Pencapaian Target Penyelesaian DIPA} = \frac{\text{Realisasi Penyelesaian DIPA, SAPSK, Dokumen alokasi dana transfer ke daerah}}{\text{Target Penyelesaian DIPA, SAPSK, Dokumen alokasi dana transfer ke daerah}} \times 100\%$$

Tujuan

KPI ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBN

Satuan Pengukuran:	Persentase
--------------------	------------

Person in Charge:	DJPBN, DJA, DJPK
-------------------	------------------

Sumber Data:	DJA, RKAKL (K/L), UU APBN, Perpres, PMK, alokasi transfer ke daerah, serta DIPA
--------------	---

Tindakan apabila data belum tersedia:	Ditjen Perbendaharaan, kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah
---------------------------------------	--

Polarisasi Indikator Kinerja:	Maximize
-------------------------------	----------

Periode Pelaporan:	Tahunan
--------------------	---------

Jumlah dokumen alokasi belanja pusat dan dana transfer ke daerah tepat waktu (Sub KPI : K/L dan Pemda)	2007 (Baseline)	Target 2008
Th 2008	100%	100%

Sub Indikator Kinerja Utama 1.1.1 :	Jumlah DIPA tepat waktu
--	-------------------------

Deskripsi:	Definisi: Dokumen alokasi belanja pusat adalah DIPA kementerian negara/lembaga yang telah disahkan berdasarkan hasil penelaahan antara Ditjen Perbendaharaan dengan kementerian negara/lembaga. Tepat waktu adalah penyelesaian pengesahan DIPA sesuai dengan jadwal yang
------------	---

Formulasi

Jumlah DIPA seluruh K/L dan DIPA BA APP yang disahkan pada 31 Desember

Tujuan

KPI ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBN

Satuan Pengukuran:	Jumlah
--------------------	--------

Person in Charge:	Direktur Jenderal Perbendaharaan
-------------------	----------------------------------

Sumber Data:	SAPSK, RKA-K/L
--------------	----------------

Tindakan apabila data belum tersedia:	Ditjen Perbendaharaan, kementerian negara/lembaga
---------------------------------------	---

Polarisasi Indikator Kinerja:	Maximize
-------------------------------	----------

Periode Pelaporan:	Tahunan
--------------------	---------

Jumlah dokumen DIPA K/L tepat waktu	2007 (Baseline)	Target 2008
Th 2008	13.317	13.317

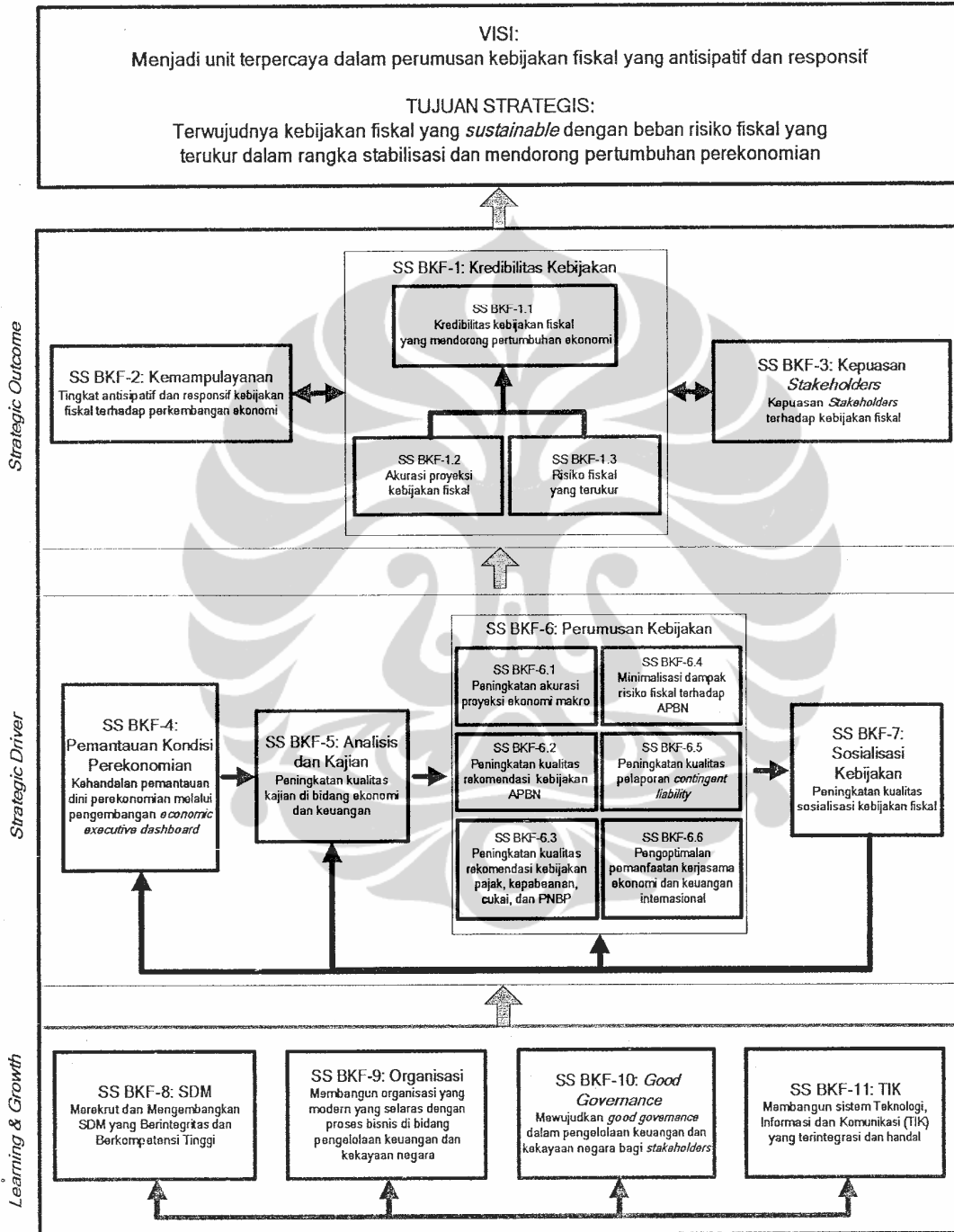
Lampiran 9

KPI TEMA BELANJA NEGARA TAHUN 2008

SS	No. KPI	Key Performance Indicator	2007	Target 2008	Realisasi 2008	PIC
SS.BEL.1	1.1.1.	Jumlah DIPA tepat waktu	13,317	13,317	12,188	DJPb
	1.1.2.	% Jumlah SAPSK tepat waktu		100%	100%	DJA
	1.1.3.	% Jumlah dokumen alokasi belanja dana transfer ke daerah tepat waktu		100%	100%	DJPK
	1.2.1	Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat	N/A	3	3.2	DJA, DJPb
	1.2.2	Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah		3	3	DJPK
SS.BEL.2	2.1.	% penyerapan anggaran Daerah tepat waktu		100%	100.98%	DJPK
	2.2.	Jumlah K/L yang mendapat opini WTP dari BPK.	7	10	15	DJPb
SS.BEL.3	3.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi anggaran belanja negara	2	2	100%	DJA, BKF
	3.2.	Jumlah jenis standar kegiatan dan biaya K/L yang dimutakhirkan	1548	1903	2709	DJA
	3.3.	% penerbitan norma, standar, dan pedoman alokasi belanja negara yang tepat waktu sesuai rencana		100%	110%	DJPb, BKF, DJA
SS.BEL.4	4.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi dana transfer ke daerah sesuai rencana	2	2	100%	DJPK, BKF
SS.BEL.5	5.1.	% pencapaian peraturan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran	100%	100%	105.67%	DJPb, DJA
	5.2.	Indeks kepuasan stakeholders atas peraturan pelaksanaan anggaran		3	2.63	DJPb, DJA
SS.BEL.6	6.1.	% kegiatan sosialisasi sesuai rencana	100%	100%	100%	DJA, DJPb, DJPK
SS.BEL.7	7.1.	% subsidi terhadap PDB		100%	100%	BKF, DJA
	7.2.	% alokasi subsidi dan belanja sosial untuk program MDG terhadap PDB	100%	100%	100%	BKF, DJA
	7.3.	% deviasi subsidi (BBM dan Non Energi)		5%	9.53%	BKF, DJA
SS.BEL.8	8.1.	% kepatuhan alokasi dana transfer ke daerah terhadap norma dan standar	100%	100%	100%	DJPK
	8.2.	Indeks kepuasan daerah terhadap norma dan standar		3	3	DJPK
SS.BEL.9	9.1.	% pemenuhan alokasi belanja mengikat K/L didasarkan kepada standar		100%	100%	DJA
	9.2.	% kesesuaian RKAKL terhadap kebijakan penyusunan anggaran		100%	100%	DJA
	9.3.1	% jumlah revisi RKAKL/SAPSK		100%	100%	DJA
	9.3.2	% jumlah revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	DJPb
SS.BEL.10	10.1.	% jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan secara tepat waktu	100%	100%	100%	DJPb
	10.2.	Indeks kepuasan stakeholders atas kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran		3	3.05	DJPb
SS.BEL.11	11.1.	Ratio antara realisasi dengan rencana penyaluran/penerimaan dana	87%	90%	98.67%	DJPb
	11.2.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas dan pelayanan penyaluran dana	3	3	3.02	DJPb
SS.BEL.12	12.1.	% cakupan hasil monev terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	DJPb
	12.2.	% pemanfaatan hasil monev untuk bahan pengambilan kebijakan dibidang penganggaran dan perbendaharaan negara	100%	100%	125%	DJPb
SS.BEL.13	13.1.1.	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran K/L	100%	100%	100%	DJPb
	13.1.2.	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemda	100%	100%	92.25%	DJPK
	13.2.	% penyelesaian LKPP secara tepat waktu	100%	100%	100%	DJPb
	13.3.	% jumlah temuan auditor atas penyimpangan belanja negara yang ditindaklanjuti	0	100%	0%	DJPb
	13.4.	% rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	0.97	100%	99.38%	DJPb
SS.BEL.14.	14.1.	% karyawan yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik	0	100%	N/A	DJA, DJPb, DJPK, Sejen
	14.2.	% capaian Jam pelatihan dalam jabatan tematik	0	100%	75%	BPPK, DJA, DJPb, DJPK
	14.3.	Jumlah pegawai di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara yang terkena Kasus KKN.	0	10	8	Ijen
SS.BEL.15	15.1.	% penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat	6975	100%	100%	DJA, DJPb, DJPK
	15.2.	% sarana dan prasarana terpenuhi sesuai rencana DIPA	0.582	95%	95%	DJA, DJPb, DJPK
SS.BEL.16	16.1.	% jumlah temuan audit sejenis oleh ITJEN di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit		25%	25%	Ijen
	16.2.	% rekomendasi audit ITJEN yang telah ditindaklanjuti.		85%	85%	Ijen
SS.BEL.17	17.1.	Jumlah sistem aplikasi TIK di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara yang terimplementasi sesuai rencana	100%	100%	100%	DJA, DJPb, DJPK, Pusintek

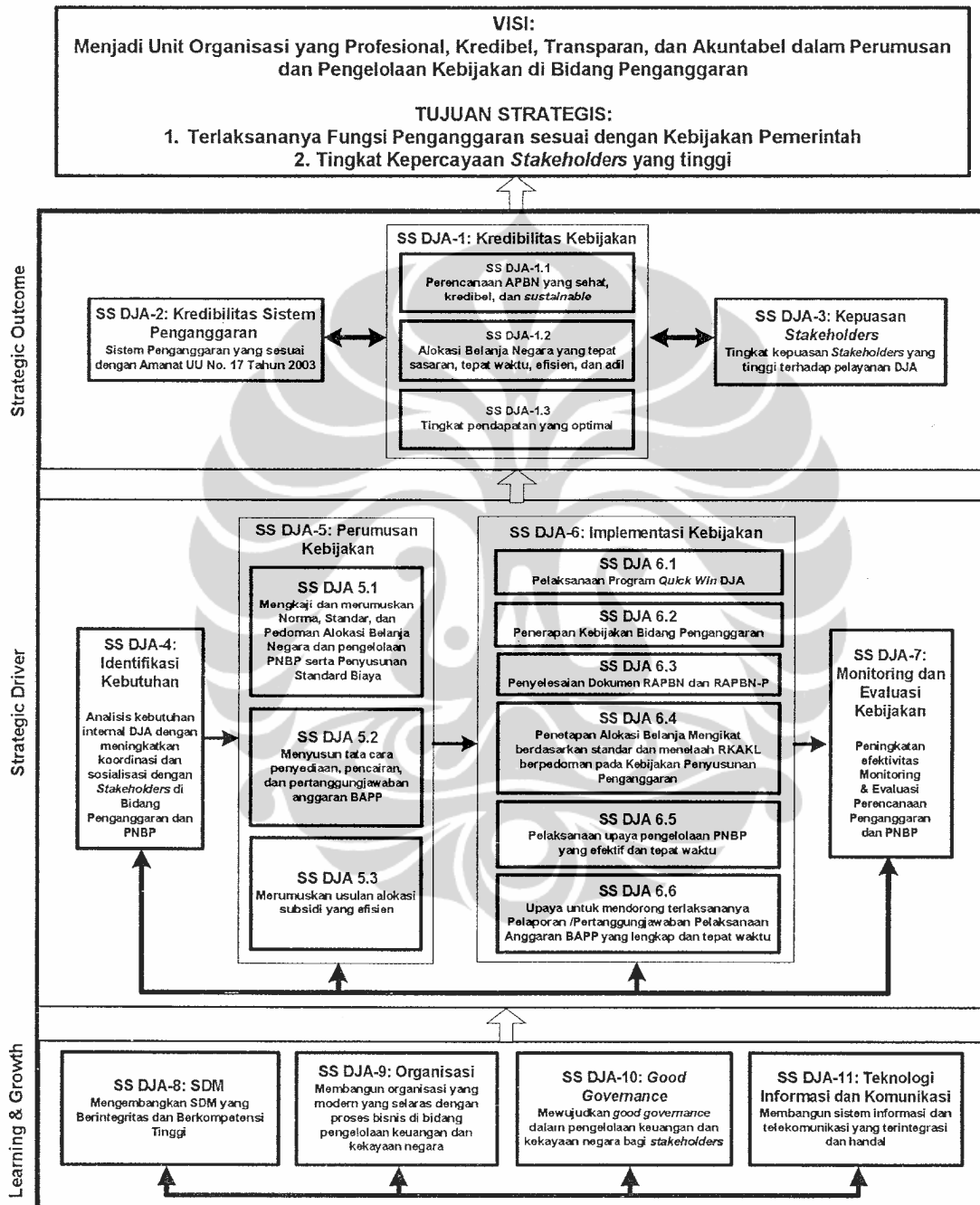
Sumber: SMO Manager - Pushaka, Departemen Keuangan, 2009

STRATEGY MAP DEPKEU-ONE BADAN KEBIJAKAN FISKAL



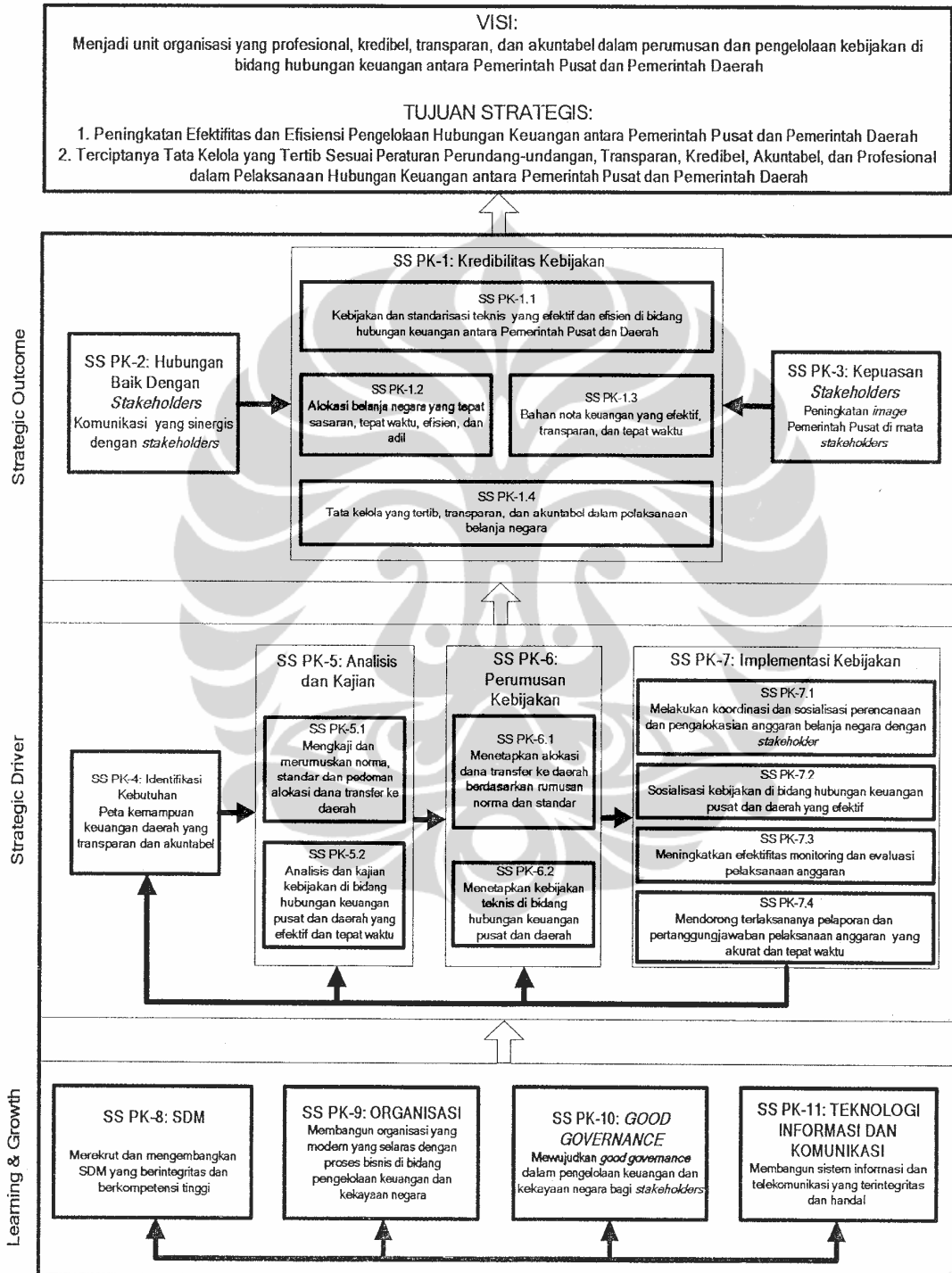
Sumber: SMO Manager (Pushaka) Departemen Keuangan, 2009

STRATEGY MAP DEPKEU-ONE DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



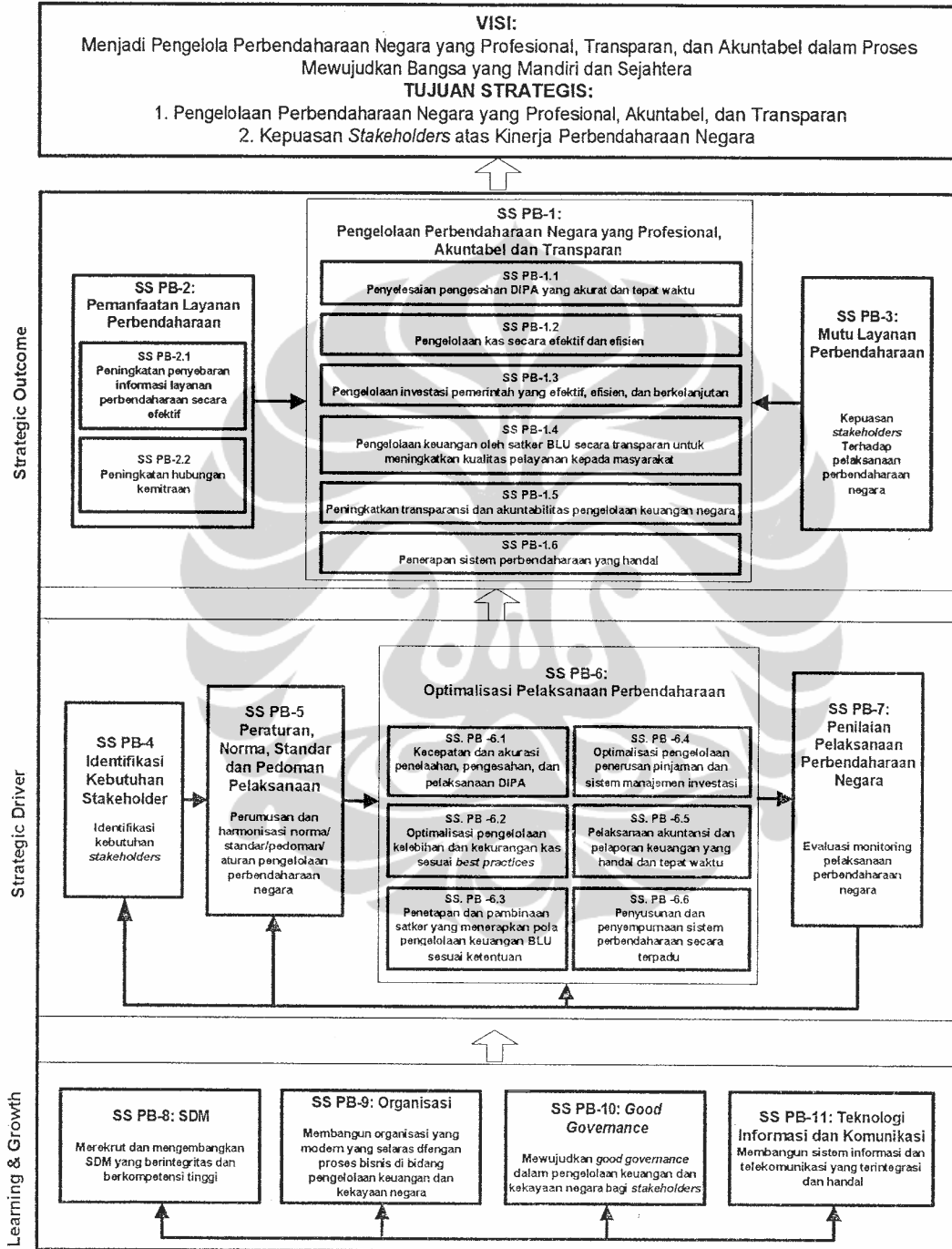
Sumber: SMO Manager (Pushaka) Departemen Keuangan, 2009

STRATEGY MAP DEPKEU-ONE DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



Sumber: SMO Manager (Pushaka) Departemen Keuangan, 2009

STRATEGY MAP DEPKEU-ONE DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Sumber: SMO Manager (Pushaka) Departemen Keuangan, 2009

Lampiran 14

ALIGNMENT VERTIKAL DEPKEU-WIDE DAN DEPKEU-ONE BKF

No.	Sasaran Strategis	No.	KPI	No.	Sasaran Strategis	No.	KPI
SS.BEL.3	Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi belanja negara serta penyusunan kegiatan dan biaya K/L	3.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi anggaran belanja negara termasuk belanja K/L sesuai rencana	SS BKF-6.2	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan APBN	6.2.5	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi Anggaran Belanja Negara termasuk Belanja K/L sesuai rencana
SS.BEL.4	Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi dana transfer ke daerah	4.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi dana transfer ke daerah sesuai rencana	SS BKF-6.2	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan APBN	6.2.6	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi dana transfer ke daerah sesuai rencana
SS.BEL.7	Menetapkan alokasi subsidi dan belanja lain-lain agar tepat sasaran dan efisien	7.1. 7.2. 7.3.	% subsidi terhadap PDB % alokasi subsidi dan belanja sosial untuk program MDG terhadap PDB % pengalihan dari total subsidi harga terhadap subsidi tepat sasaran	SS BKF-6.2	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan APBN	6.2.7 6.2.4 6.2.3	Persentase subsidi terhadap PDB % alokasi subsidi dan belanja sosial untuk program MDG terhadap PDB % alokasi subsidi (BBM dan Non Energi)
SS.BEL.14.	Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	14.1. 14.2. 14.3.	% karyawan yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik % capaian Jam pelatihan dalam jabatan tematik Jumlah pegawai di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara yang terkena Kasus KKN.	SS BKF-8	Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi	- - 8.3 8.4 8.5 8.6	- - Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total belanja BKF Rasio jumlah pegawai yang terkena kasus pelanggaran berat atau penyalahgunaan wewenang Komposisi ideal pegawai berijazah S2 dan S3 Tingkat kepuasan pegawai
SS.BEL.15	Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	15.1. 15.2.	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat % sarana dan prasarana terpenuhi sesuai rencana DIPA	SS BKF-9	Membangun organisasi yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	9.1 - 9.3 9.4 9.5	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat - Rasio antara capaian IKU yang berlabel merah dengan seluruh capaian IKU % Jumlah waktu rapat Pimpinan yang ditindaklanjuti Rasio jumlah rekomendasi kebijakan fiskal kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan kepada unit eselon I teknis
SS.BEL.16	Mewujudkan good governance di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara bagi stakeholder.	16.1. 16.2.	% jumlah temuan audit sejenis oleh ITJEN berdasarkan Laporan Hasil Audit % rekomendasi audit ITJEN yang telah ditindaklanjuti	SS BKF-10	Mewujudkan Good Governance dalam penganggaran dan perbendaharaan negara bagi stakeholders	10.1 10.2 10.3	% jumlah temuan audit oleh ITJEN berdasarkan Laporan Hasil Audit % rekomendasi audit yang telah ditindaklanjuti % pejabat yang melaporkan LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara)
SS.BEL.17	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	17.1.	Jumlah sistem aplikasi TIK yang terimplementasi sesuai rencana	SS BKF-11	Membangun sistem informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dan handal	11.1 11.2 11.3	Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan dengan jumlah pegawai Persentase sistem aplikasi yang dikembangkan terhadap rencana Jumlah database yang terintegrasi antar unit eselon II

Sumber: SMO Manager - Pushaka, Departemen Keuangan - Telah Diolah Kembali

Lampiran 15

ALIGNMENT VERTIKAL DEPKEU-WIDE DAN DEPKEU-ONE DJA

No.	Sasaran Strategis	No.	KPI	No.	Sasaran Strategis	No.	KPI
SS.BEL.1	Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil	1.1.1.	Jumlah DIPA tepat waktu	SS DJA-1.2	Alokasi Belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil	1.2.1	Konsistensi program dan kegiatan dalam RKAKL/SAPSK dengan RKP
		1.1.2.	% Jumlah SAPSK tepat waktu	SS DJA-3		Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> yang tinggi terhadap pelayanan DJA	3.1
		1.1.3.	% Jumlah dokumen alokasi belanja dana transfer ke daerah tepat waktu			3.2	Indeks kepuasan atas proses penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN yang dikelola oleh K/L
		1.2.1	Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat			3.3	Indeks kepuasan <i>stakeholders</i> atas kebijakan sistem penganggaran
		1.2.2	Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah				
SS.BEL.3	Mengkaji dan merumuskan norma, standar dan pedoman alokasi belanja negara serta penyusunan kegiatan dan biaya K/L	3.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi anggaran belanja negara termasuk belanja K/L sesuai rencana	SS DJA-5.1	Mengkaji dan merumuskan Norma, Standar, dan Pedoman Alokasi Belanja Negara dan pengelolaan PNBPN serta Penyusunan Standar Biaya	5.1.1	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan bidang penganggaran sesuai rencana
		3.2.	Jumlah jenis standar kegiatan dan biaya K/L yang dimutakhirkan			5.1.2	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan bidang PNBPN sesuai rencana
		3.3.	% penerbitan norma, standar, dan pedoman alokasi belanja negara yang tepat waktu sesuai rencana	SS DJA-6.2		Penerapan Kebijakan Bidang Penganggaran	5.1.3
						6.2.1	Penyelesaian Juknis RKAKL yang tepat waktu
						6.2.2	Penyelesaian Standar Biaya Umum yang tepat waktu
						6.2.3	Penyelesaian Norma Penyusunan Standar Biaya Khusus yang tepat waktu
						6.2.4	Penyelesaian Peraturan dan Kebijakan Penganggaran Lainnya
SS.BEL.5	Mengkaji dan Merumuskan norma, standar dan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.	5.1.	% Pencapaian peraturan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran	SS DJA-2	Sistem penganggaran sesuai dengan amanat UU No. 17	2.1	Kajian penganggaran yang diimplementasikan dalam sistem penganggaran
		5.2.	Indeks kepuasan <i>stakeholders</i> atas peraturan pelaksanaan anggaran	SS DJA-5.2	Menyusun tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran BAPP	5.2.1	Jumlah peraturan tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran BAPP yang tersaji
SS.BEL.6	Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan <i>stakeholders</i>	6.1.	% kegiatan sosialisasi sesuai rencana	SS DJA-4	Analisis kebutuhan internal DJA dengan meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan <i>stakeholders</i> di bidang Penganggaran dan PNBPN	4.1	Jumlah kegiatan koordinasi dan sosialisasi bidang penganggaran sesuai rencana
						4.2	Jumlah kegiatan koordinasi dan sosialisasi bidang PNBPN sesuai rencana
SS.BEL.9	Menetapkan alokasi belanja mengikat berdasarkan kinerja K/L dan menelaah RKAKL berpedoman pada kebijakan penyusunan anggaran	9.1.	% pemenuhan alokasi belanja mengikat K/L didasarkan kepada standar	SS DJA-6.1	Pelaksanaan Program Quick Win DJA	6.1.1	Penyelesaian SAPSK yang tepat waktu
		9.2.	% kesesuaian RKAKL terhadap kebijakan penyusunan anggaran			6.1.2	Revisi SAPSK yang selesai tepat waktu
		9.3.1	% jumlah revisi RKAKL/SAPSK	SS DJA-6.4	Penetapan a.b.m berdasarkan standar dan menelaah RKAKL berpedoman pada Kebijakan Penyusunan Penganggaran	6.1.3	Standar Biaya Khusus yang dihasilkan tepat waktu
		9.3.2	% jumlah revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu			6.1.4	Deviasi Pagu Penggunaan PNBPN pada tahun anggaran berjalan
					6.1.5	Jumlah RPP tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang selesai sesuai rencana	
						6.4.1	Pemenuhan alokasi belanja mengikat K/L didasarkan kepada standar
						6.4.2	Kesesuaian SAPSK terhadap Kebijakan Penyusunan Anggaran
						6.4.3	Jumlah revisi SAPSK Non APBN-P

(Lanjutan)

SS.BEL.12	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	12.1. 12.2.	Persentase cakupan hasil monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran % pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk bahan pengambilan kebijakan	SS DJA-7	Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan PNB	7.1 7.2 7.3	Laporan pelaksanaan APBN Semester I dan prognosis Semester II tepat waktu Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk bahan pengambilan kebijakan di bidang penganggaran Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk bahan pengambilan kebijakan di bidang PNB
SS.BEL.13	Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu	13.1.1. 13.1.2. 13.2. 13.3. 13.4.	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran K/L % tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemda % penyelesaian LKPP secara tepat waktu % jumlah temuan auditor atas penyimpangan belanja negara yang ditindaklanjuti % rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	SS DJA-6.6	Upaya untuk mendorong terlaksananya Pelaporan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran BAPP yang lengkap dan tepat waktu	6.6.1 6.6.2	Tingkat ketepatan waktu pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan BAPP K/L dan pihak lain Jumlah Laporan Keuangan BAPP yang lengkap terhadap seluruh Laporan Keuangan BAPP
SS.BEL.14	Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	14.1. 14.2. 14.3.	% karyawan yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik % capaian Jam pelatihan dalam jabatan tematik Jumlah pegawai di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara yang terkena Kasus KKN.	SS DJA-8	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi	8.1 8.4 8.2 8.3 8.5 8.6	% karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik - Rasio jumlah pegawai yang terkena kasus pelanggaran berat atau penyalahgunaan wewenang Rasio volume APBN per jumlah pegawai Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total belanja DJA Komposisi ideal pegawai berijazah S2 dan S3 Tingkat kepuasan pegawai
SS.BEL.15	Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	15.1. 15.2.	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat % sarana dan prasarana terpenuhi sesuai rencana DIPA	SS DJA-9	Membangun organisasi yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat Modernisasi unit organisasi di lingkungan DJA Rasio antara capaian IKU yang berlabel merah dengan seluruh capaian IKU % Jumlah waktu rapat Pimpinan dalam membahas/memonitor capaian IKU % Jumlah rekomendasi Rapat Pimpinan yang ditindaklanjuti
SS.BEL.16	Mewujudkan good governance di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara bagi stakeholder.	16.1. 16.2.	% jumlah temuan audit sejenis oleh ITJEN berdasarkan Laporan Hasil Audit. % rekomendasi audit ITJEN yang telah ditindaklanjuti	SS DJA-10	Mewujudkan Good Governance dalam bidang penganggaran dan perbendaharaan bagi stakeholder	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	% Jumlah temuan audit sejenis berdasarkan Laporan Hasil % Rekomendasi audit yang telah ditindaklanjuti Indeks <i>Good Governance</i> DJA % ditindaklanjutinya rekomendasi penjatuhan sanksi Persentase pejabat yang melaporkan LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara) Opini BPK atas laporan keuangan DJA Persentase implementasi <i>e-procurement</i>
SS.BEL.17	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	17.1.	Jumlah sistem aplikasi TIK yang terimplementasi sesuai rencana	SS DJA-11	Membangun sistem informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dan handal	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan Jumlah sistem aplikasi yang terintegrasi antar unit eselon II % sistem aplikasi transformasi dan analisis TIK yang terimplementasi sesuai rencana Jumlah database yang terintegrasi dalam <i>data warehouse</i> (SISKOLAB) % peningkatan pelayanan masyarakat setelah terotomasi

Sumber: SMO Manager - Pushaka, Departemen Keuangan - Telah Diolah Kembali

Lampiran 16

ALIGNMENT VERTIKAL DEPKEU-WIDE DAN DEPKEU-ONE DJPK

No.	Sasaran Strategis	No.	KPI	No.	Sasaran Strategis	No.	KPI
SS.BEL.1	Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil	1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.1 1.2.2	Jumlah DIPA tepat waktu % Jumlah SAPSK tepat waktu % Jumlah dokumen alokasi belanja dana transfer ke daerah tepat waktu Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah	SS PK-1.2	Alokasi Belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil	1.2.1	Jumlah dokumen alokasi belanja dana transfer ke daerah tepat waktu
SS.BEL.2	Tata Kelola Yang Tertib, Transparan dan Akuntabel Dalam Pelaksanaan Belanja Negara	2.1. 2.2.	Persentase penyerapan anggaran Daerah tepat waktu Jumlah K/L yang mendapat opini WTP dari BPK.	SS PK-1.4	Tata Kelola Yang Tertib, Transparan dan Akuntabel Dalam Pelaksanaan Belanja Negara	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	% ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan % penyaluran transfer ke daerah tepat waktu % tersedianya data keuangan daerah % rekomendasi yang diindaklanjuti
SS.BEL.4	Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi dana transfer ke daerah	4.1.	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan alokasi dana transfer ke daerah sesuai rencana	SS PK-5.1 SS PK-5.2	Mengkaji dan merumuskan norma, standar dan pedoman alokasi dana transfer ke daerah Analisis dan kajian kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif dan tepat waktu	5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3	Jumlah formulasi/pembaruan kebijakan sesuai rencana % ketepatan waktu melaksanakan analisis usulan pinjaman daerah % ketepatan waktu penyelesaian evaluasi Raperda tentang PDRD % ketepatan waktu penyelesaian buku pegangan Panitia Anggaran DPR-RI mengenai kebijakan transfer ke daerah
SS.BEL.6	Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan stakeholders	6.1.	% kegiatan sosialisasi sesuai rencana	SS PK-7.1 SS PK-7.2	Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan Sosialisasi kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif	7.1.1 7.2.1 7.2.2	% kegiatan sosialisasi sesuai rencana Tingkat efektivitas bimbingan teknis dan sosialisasi % kegiatan sosialisasi sesuai rencana
SS.BEL.8	Menetapkan alokasi Dana Transfer ke Daerah berdasarkan rumusan norma dan standar	8.1. 8.2.	% kepatuhan alokasi dana transfer ke daerah terhadap norma dan standar Indeks kepuasan daerah terhadap norma dan standar	SS PK-6.1 SS PK-6.2	Menetapkan alokasi dana transfer ke daerah berdasarkan rumusan norma Menetapkan kebijakan teknis di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah	6.1.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3	% kesesuaian alokasi dana transfer ke daerah terhadap norma dan standar Tingkat kesesuaian alokasi hibah terhadap rencana Tingkat pemahaman Pemerintah Daerah terhadap kebijakan dan formulasi transfer ke daerah Kesesuaian alokasi transfer ke daerah sesuai rencana
SS.BEL.12	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	12.1. 12.2.	Persentase cakupan hasil monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran % pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk bahan pengambilan kebijakan	SS PK-7.3	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	7.3.1	Tingkat kesesuaian informasi dengan kebutuhan
SS.BEL.13	Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu	13.1.2. 13.1.2. 13.2. 13.3.	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemda % tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemda % penyelesaian LKPP secara tepat waktu % jumlah temuan auditor atas penyimpangan belanja	SS PK-1.3 SS PK-7.4	Bahan nota keuangan yang efektif, transparan, dan tepat waktu Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu	1.3.1 7.4.3 7.4.1 7.4.2	Ketepatan waktu penyampaian bahan nota keuangan % tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban % tingkat ketepatan waktu pelaporan berkala Penyelesaian penyusunan LKPP transfer ke daerah secara tepat waktu

(Lanjutan)

SS.BEL.14.	Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	14.1. 14.3.	% karyawan yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik Jumlah pegawai di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara yang terkena Kasus KKN.	SS PK-8	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	% karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik Rasio volume APBN per jumlah pegawai Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total belanja DJPK Rasio jumlah pegawai yang terindikasi kasus pelanggaran berat/penyalahgunaan wewenang Komposisi ideal pegawai berijasah S2 s.d S3 Tingkat kepuasan pegawai
SS.BEL.15	Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	15.1. 15.2.	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat % sarana dan prasarana terpenuhi sesuai rencana DIPA	SS PK-9	Membangun organisasi yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat Modernisasi unit organisasi di lingkungan DJA Rasio antara capaian IKU yang berlabel merah dengan seluruh capaian IKU % Jumlah waktu rapat Pimpinan dalam membahas/memonitor capaian IKU % Jumlah rekomendasi Rapat Pimpinan yang ditindaklanjuti
SS.BEL.16	Mewujudkan good governance di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara bagi stakeholder.	16.1. 16.2.	% jumlah temuan audit sejenis oleh ITJEN berdasarkan Laporan Hasil Audit. % rekomendasi audit ITJEN yang telah ditindaklanjuti	SS PK-10	Mewujudkan Good Governance dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara bagi stakeholders	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	% Jumlah temuan audit sejenis berdasarkan Laporan Hasil Audit % Rekomendasi audit yang telah ditindaklanjuti Indeks Good Governance DJA % ditindaklanjutinya rekomendasi penjatihan sanksi % pejabat yang melaporkan LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara) Opini BPK atas laporan keuangan DJA % implementasi e-procurement
SS.BEL.17	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	17.1.	Jumlah sistem aplikasi TIK yang terimplementasi sesuai rencana	SS PK-11	Membangun sistem informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dan handal	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan dengan jumlah pegawai Jumlah sistem aplikasi yang terintegrasi antar unit eselon I % sistem aplikasi transformasi dan analisis TIK yang terimplementasi sesuai rencana Jumlah database yang terintegrasi dalam data warehouse (SISKOLAB) % peningkatan pelayanan masyarakat setelah terotomasi
				SS PK-1.1	Kebijakan dan standarisasi teknis yang efektif dan efisien di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1.1.1	% realisasi atau implementasi kebijakan terhadap rencana
				SS PK-2	Komunikasi yang sinergis dengan stakeholders	2.1	Tingkat pemahaman Pemerintah Daerah terhadap kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah
				SS PK-3	Peningkatan image Pemerintah Pusat di mata stakeholders	3.1 3.2	% tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana pelaksanaan evaluasi Tingkat kepuasan stakeholder
				SS PK-4	Peta kemampuan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	4.1	Tersedianya peta kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah

Sumber: SMO Manager - Pushaka, Departemen Keuangan - Telah Diolah Kembali

Lampiran 17

ALIGNMENT VERTIKAL DEPKEU-WIDE DAN DEPKEU-ONE DJPb

No.	Sasaran Strategis	No.	KPI	No.	Sasaran Strategis	No.	KPI
SS.BEL.1	Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil	1.1.1.	Jumlah DIPA tepat waktu		Tidak mencantumkan pada Depkeu-One dan Depkeu-Two		
		1.2.1	Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat	SS PB-3	Kepuasan stakeholders terhadap pelaksanaan perbendaharaan negara	3.2	Indeks kepuasan stakeholders terhadap pelaksanaan perbendaharaan
		1.2.2	Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah				
SS.BEL.2	Tata Kelola Yang Tertib, Transparan dan Akuntabel Dalam Pelaksanaan Belanja Negara	2.2.	Jumlah K/L yang mendapat opini WTP dari BPK.	SS PB-1.5	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara	1.5.2	Jumlah K/L yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK
SS.BEL.3	Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi belanja negara serta penyusunan kegiatan dan biaya K/L	3.3	% penerbitan norma, standar, dan pedoman alokasi belanja negara yang tepat waktu sesuai rencana	SS PB-5	Perumusan dan harmonisasi norma/standar/pedoman/ aturan pengelolaan perbendaharaan negara	5.1	% jumlah rancangan peraturan di bidang perbendaharaan negara yang dihasilkan
SS.BEL.5	Mengkaji dan Merumuskan norma, standard dan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.	5.1.	% Pencapaian peraturan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran	SS PB-5	Perumusan dan harmonisasi norma/standar/pedoman/ aturan pengelolaan perbendaharaan negara	5.2	% jumlah peraturan di bidang perbendaharaan negara yang dihasilkan
		5.2.	Indeks kepuasan stakeholders atas peraturan pelaksanaan anggaran	SS PB-3	Kepuasan stakeholders terhadap pelaksanaan perbendaharaan negara	3.3	Indeks kepuasan stakeholders atas peraturan pelaksanaan anggaran
SS.BEL.6	Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan stakeholders	6.1.	% kegiatan sosialisasi sesuai rencana	SS PB-2	Peningkatan penyebaran informasi layanan perbendaharaan secara efektif	2.1	Tingkat pemahaman stakeholders terhadap semua ketentuan produk dan layanan perbendaharaan
SS.BEL.9	Menetapkan alokasi belanja mengikat berdasarkan kinerja K/L dan menelaah RKAKL berpedoman pada kebijakan penyusunan anggaran	9.3.2	% jumlah revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu	SS PB-1.1	Penyelesaian pengesahan DIPA yang akurat dan tepat waktu	1.1.3	% Jumlah satker yang revisi DIPA-nya terselesaikan tepat waktu
SS.BEL.10	Meningkatkan kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran	10.1.	% jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan secara tepat waktu	SS PB-1.1	Penyelesaian pengesahan DIPA yang akurat dan tepat waktu	1.1.1	% jumlah satker yang DIPA-nya disahkan tepat waktu pada
		10.2.	Indeks kepuasan stakeholders atas kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran	SS PB-3	Kepuasan stakeholders terhadap pelaksanaan perbendaharaan negara	3.4	Indeks kepuasan stakeholders atas kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
SS.BEL.11	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas dan pelayanan penyaluran dana	11.1.	Ratio antara realisasi dengan rencana penyaluran/penerimaan dana	SS PB-1.3	Pengelolaan investasi pemerintah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan	1.3.3	% penyaluran dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya yang disetujui
				SS PB-6.2	Optimalisasi pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas sesuai dengan best	6.2.1	% Tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas dibandingkan dengan realisasi penerimaan kas
						6.2.2	% Tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas dibandingkan dengan realisasi pengeluaran kas
		11.2.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas dan pelayanan penyaluran dana	SS PB-3	Kepuasan stakeholders terhadap pelaksanaan perbendaharaan negara	3.5	Indeks kepuasan stakeholders atas efektivitas dan efisiensi pelayanan penyaluran dana

(Lanjutan)

SS.BEL.12	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	12.1.	Persentase cakupan hasil monitoring dan evaluasi terhadap	SS PB-7	Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan PNPB	7.7 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.8	% Monitoring penyelesaian DIPA dan permasalahan pelaksanaan DIPA % Hasil monitoring penyelesaian laporan keuangan K/L secara tepat waktu % Hasil monitoring penyelesaian laporan keuangan tingkat kuasa BUN secara tepat waktu % Hasil monitoring rekonsiliasi yang dilakukan dalam rangka pengelolaan kas negara % Jumlah tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi di bidang investasi dan pembiayaan lainnya terhadap jumlah hasil monitoring dan evaluasi di bidang investasi dan pembiayaan lainnya % Jumlah kepatuhan implementasi terhadap jumlah kebijakan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman, kredit program dan pembiayaan lainnya % Hasil monitoring & evaluasi kinerja keuangan satker BLU berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan
SS.BEL.13	Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu	13.1.1.	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran K/L	SS PB-6.5	Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang handal dan tepat waktu	6.5.3	% tingkat ketepatan waktu pelaporan dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran K/L
		13.3.	% jumlah temuan auditor atas penyimpangan belanja negara yang ditindaklanjuti	SS PB-10	Mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan	10.1	% jumlah temuan auditor atas penyimpangan belanja negara yang ditindaklanjuti
		13.4.	% rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	SS PB-6.5	Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang handal dan tepat waktu	6.5.1	Penyelesaian pembahasan dan penyusunan Rencana Tindak Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP
SS.BEL.14.	Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara	14.1.	% karyawan yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik	SS PB-8	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompensi tinggi	8.1	Jumlah jabatan yang telah terisi oleh pegawai yang telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
		14.2.	% capaian Jam pelatihan dalam jabatan tematik			8.2	Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total
SS.BEL.15	Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan	15.1.	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat	SS PB-9	Membangun organisasi yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan	9.1	% Penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat
SS.BEL.17	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan	17.1.	Jumlah sistem aplikasi TIK yang terimplementasi sesuai rencana	SS PB-11	Membangun sistem informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dan handal	11.4	% sistem aplikasi transformasi dan analitis TIK yang terimplementasi sesuai rencana

Sumber: SMO Manager - Pushaka, Departemen Keuangan - Telah Diolah Kembali